

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang selalu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak karena terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pengaturan narkoba dalam hukum Indonesia diatur secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pendekatan rehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam pengaturan ini. Undang-undang mewajibkan pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebagai upaya memulihkan kondisi mereka agar bisa kembali berfungsi dalam masyarakat secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan ruang untuk pemulihan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh BNN Provinsi Jambi dan mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi BNN Provinsi Jambi dalam menjalankan strategi rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Jambi dilakukan melalui rehabilitasi medis, khususnya rawat jalan. Dalam proses ini, korban mendapatkan sesi konseling yang bertujuan untuk membantu pemulihan secara psikologis dan sosial serta dalam menjalankan program rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, BNN Provinsi Jambi menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi, adanya stigma dan diskriminasi terhadap korban, ketidakteraturan kehadiran klien selama proses rehabilitasi, permasalahan hukum yang dialami oleh sebagian klien, serta minimnya pendampingan yang berkelanjutan setelah klien menyelesaikan program rehabilitasi. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pengurangan stigma, pembinaan kedisiplinan peserta, pendampingan hukum, serta penguatan program pascarehabilitasi BNN Provinsi Jambi berupaya menghadapi kendala ini.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Korban Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkoba Nasional

ABSTRACT

Drug abuse is a problem that continues to receive serious attention from various parties due to its continued increase over time. The regulation of narcotics in Indonesian law is comprehensively regulated through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The rehabilitation approach is also an important part of this regulation. The law requires drug addicts to undergo medical and social rehabilitation, as an effort to restore their condition so they can return to functioning optimally in society. This shows that the law is not only repressive, but also provides space for recovery. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of rehabilitation for victims of drug abuse crimes by the Jambi Province National Narcotics Agency (BNN) and to identify and analyze the obstacles faced by the Jambi Province BNN in implementing rehabilitation strategies for victims of drug abuse crimes. The method used in this study is an empirical juridical research method. Data collection in this study was conducted through interviews. From the results of this study, it can be concluded that the implementation of rehabilitation for victims of drug abuse crimes by the Jambi Province National Narcotics Agency (BNN) is carried out through medical rehabilitation, specifically outpatient treatment. During this process, victims receive counseling sessions aimed at assisting with psychological and social recovery. In implementing the rehabilitation program for drug abuse victims, the Jambi Provincial National Narcotics Agency (BNN) faces various obstacles. These include a lack of public awareness of the importance of rehabilitation, stigma and discrimination against victims, irregular client attendance during the rehabilitation process, legal issues experienced by some clients, and a lack of ongoing support after clients complete the rehabilitation program. By increasing public awareness, reducing stigma, fostering participant discipline, providing legal assistance, and strengthening post-rehabilitation programs, the Jambi Province BNN is trying to address these obstacles.

Keywords: *Rehabilitation, Victims of Drug Abuse, National Narcotics Agency*